



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)**

Alamat : Jl. A. Syairani No. 18 Pelaihari 70814 Telp. (0612)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2019 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja Perangkat Daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didalamnya mengandung muatan Gambaran Umum SKPD, Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkruen, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang selanjutnya dijadikan dasar Penyusunan LKPJ Bupati Tanah Laut

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanann kegiatan/program kedepan

Demikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan pekerjaan kita. Amin.

Pelaihari, Januari 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700217 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I–PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum SKPD	2
C. Sumber Daya Manusia.....	4
D. Produk dan layanan	9
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.....	10
A. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.....	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	15
A. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang	15
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	15
2. Program dan Kegiatan	15
3. Jumlah Pegawai,Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	18
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	30
5.Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)	33
6.Kondisi Sarana dan Prasarana BKPSDM	41
7.Permasalahan dan Solusi.....	42
B. Indikator Kinerja Kunci	44
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.....	45
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	50
A. Tugas Pembantuan yang diterima	50
B. Tugas Pembantuan yang di Berikan	50

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	51
A. Kerjasama dengan Mitra Kerja	51
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) ..	57
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	60
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut.....	60
B. Capaian Target Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja.....	61
C. Perbandingan Capaian Kinerja 2019 terhadap capaian 2018	62
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023.....	63
E. Analisis efisiensi dalam Pencapaian Kinerja	64
F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target dan Kinerja	64
BAB IX PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023	13
Tabel 3. 1 Program Dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019	16
Tabel 3. 3 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019	18
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Per Jenis Kelamin PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019	19
Tabel 3. 5 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Per Golongan Tahun 2019	22
Tabel 3. 6 Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	26
Tabel 3. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019	30
Tabel 3. 8 Ringkasan dan Realisasi APBD SKPD berdasarkan program Tahun 2019	31
Tabel 3. 9 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM.....	44
Tabel 4. 1 Tabel Target dan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2019.....	45
Tabel 7. 1 Pencapaian Pelayanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi	58
Tabel 8. 1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	60
Tabel 8. 2 Capaian Target dan Kinerja Tahun 2019	61
Tabel 8. 3 Perbandingan Capaian Kinerja	62
Tabel 8. 4 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD 2018 - 2023	63
Tabel 8. 5 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target dan Kinerja Tahun 2019.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah pemerintah daerah diharuskan Menyusun laporan terkait dengan pertanggungjawaban Kinerja, Salah satu bentuk laporannya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mana LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah untuk itu Kemedagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing masing urusan, IKK merupakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan Penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan.

Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah kearah yang lebih transparan, Partisfatif dan akuntabilitas yang menjadi hal penting sebagai basis Kinerja pemerintah daerah yang berdasar Hukum :

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala Daerah setelah tahun Anggaran berakhir ;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPD Kepala Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

B. Gambaran Umum SKPD

a. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai **tugas Pokok** sebagai berikut :

membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi

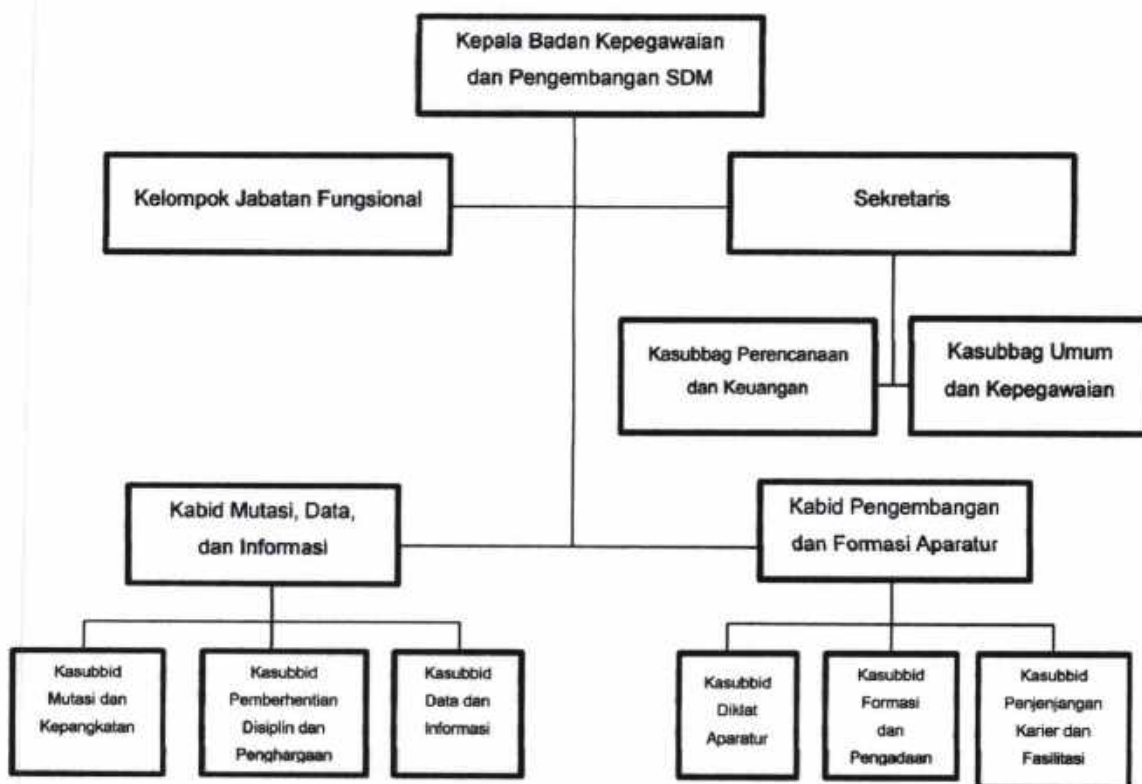
Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu ;

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Dari bagan struktur organisasi diatas sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur, membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
 - Kepala Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur.
 - Kepala Sub Bidang Diklat Aparatur
4. Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi, membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
 - Kepala Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur.
 - Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

C. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur.

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jumlah pegawai sebanyak 47 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 32 orang dan Non PNS sebanyak 15 orang yang terdiri dari :

- Golongan IV sebanyak : 2 orang
- Golongan III sebanyak : 17 orang
- Golongan II sebanyak : 13 orang
- Golongan I sebanyak : 0 orang
- Non PNS/PTT : 15 orang

Jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

- Pendidikan S.2 : 3 orang
- Pendidikan S.1 : 12 orang
- Pendidikan D. III : 12 orang
- Pendidikan SLTA : 5 orang
- Pendidikan SLTP : 0 orang
- Pendidikan SD : 0 orang

PNS Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf :

- Eselon II b : 1 orang
- Eselon III a : 0 orang
- Eselon III b : 2 orang
- Eselon IV a : 8 orang
- Widyaiswara Ahli Pertama : 1 orang
- Analis Kepegawaian Pertama : 1 orang
- Arsiparis Pelaksana Lanjutan : 1 orang
- Pranata Komputer Pertama : 1 orang
- Pranata Komputer Pelaksana : 1 orang
- Staf : 16 orang

2. Aset/Modal

Aset/modal pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, yakni:

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Tanah	17982 m2	
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6481	m2
	- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan		
	- (Pengembangan Sumber Daya Manusia)	11501	m2
2.	Alat - Alat Angkutan	10	unit
	- Jeep	1	unit
	- Mini Bus (Penumpang 14 org ke bawah)	2	unit
	- Sepeda Motor	7	unit
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	491	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11 - 13)	2	buah
	- Mesin Ketik Manual Longewagon (18)	1	buah
	- Mesin Fotocopy dengan Kertas Double Folio	2	buah
	- Lemari Besi	40	buah
	- Rak Besi / Metal	7	buah
	- Brand Kas	2	buah
	- Lemari Kaca	1	buah
	- Lemari Kayu	24	buah
	- Kotak Penyimpanan Bendera	1	buah
	- Mesin Absensi	10	buah
	- Overhead Projector	1	buah
	- Genset	3	buah
	- Mesin Pompa Air	2	buah
	- Meja Kayu / Rotan	29	buah
	- Meja Rapat	3	buah
	- Meja Podium	1	buah

- Kursi Tamu	1	set
- Kursi Putar	15	buah
- Bangku Tunggu	4	set
- Kursi Lipat	1	buah
- Meja Komputer	1	set
- Sofa	3	set
- Lemari Pakaian	4	buah
- Lemari Rias	1	buah
- Tempat Tidur Busa (Springbed)	45	buah
- Kursi Kerja	51	buah
- Gordyn	1	set
- Mesin Potong Rumput	1	unit
- Mesin Cuci	3	buah
- AC Unit	4	buah
- AC Split	13	buah
- Mainframe	1	buah
- PC Unit / Komputer PC	23	set
- Laptop	6	buah
- Note Book	17	buah
- Printer	3	buah
- CPU	1	buah
- Monitor	6	buah
- Printer	27	buah
- Scanner	3	buah
- Peralatan Personal Komputer Lain - Lain	3	buah
- UPS	19	buah
- Stabilizer / Stavolt	4	buah
- Harddisk Internal	4	buah
- Harddisk Eksternal	4	buah
- Speaker Active Komputer	6	buah
- Memory	2	buah
- Server	3	buah

	- Peralatan Jaringan Lain - Lain - Tiang Antene - Radio Access Point - Antene - Switch Hub - Wireless Access Point - Meja Kerja - Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis - Mesin Exhaust Fan - Karpet Sajadah - Kulkas	14 2 2 1 1 1 51 2 1 6 1	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	37 buah	
	- Projector + Attachment - Microphone / Wireless Mic - Handycam - Stand Microphone - Layar Projector - Televisi - Loudspeaker - Tripod Speaker - VCD / DVD Player - Mouse Pen - Camera Electronic - Micxer PVC - Faximile - Wireless Portable Sound - Sound System	4 6 2 6 2 2 1 4 1 2 3 1 1 1 1	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
5.	Alat - Alat Persenjataan / Keamanan	2 set	
	- CCTV	2	set

D. Produk dan layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini BKPSDM berkedudukan sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian secara tepat waktu dan tepat guna tanpa ada pungutan biaya dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dengan jenis produk pelayanan antara lain :

1. Menyusun formasi tentang kebutuhan PNS di Kabupaten Tanah Laut
2. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kepangkatan dan Penggajian, SK Mutasi, dan SK Pensiun
3. Data SIMPEG
4. Membuat Kartu Pegawai, TASPEN, dan TAPERUM
5. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prajabatan
6. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Struktural
7. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknis / Fungsional
8. Pelaksanaan PNS Tugas Belajar, SK Ijin Belajar, dan Ikatan Dinas
9. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD
10. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
11. Dan pelaksanaan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi BKPSDM.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Tanah Laut menjelaskan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerinTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”

- **Berkarya** bermakna merujuk pada hasil kerja, bahwa selama periode 2018 -2023 para pelaku pembangunan di daerah kabupaten Tanah Laut secara bersama sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat
- **Inovasi** bermakna Inovasi adalah solusi logis terhadap tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang berkualitas karena itu inovasi dalam penyelenggaraan public yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah kabupaten Tanah Laut harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
- **Tertata** bermakna tertib administrasi dan tertib substansi dalam sebuah siklus perencanaan yang semakin berkualitas dengan demikian kualitas perencanaan di perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin di tingkatkan secara berkesinambungan

- **Religius** Pada aspek religius ini, peran sector keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat, aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- **Aktual** Penekanan pada aspek actual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta Program dan Kegiatan perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani yaitu masyarakat di daerah kabupaten Tanah Laut.
- **Sinergi** dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong royongan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan rakyat, upaya integritas, sinkronisasi dan sinergi ditingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung

Misi :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, rumusan Misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin di capai dan membantu menguraikan upaya upaya strategis yang harus dilakukan dalam rangka Mewujudkan “ **Tanah Laut yang BERINTERAKSI**” maka Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 yakni :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. ***Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.***
3. ***Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).***
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap Misi 2 (kedua) dan Misi ke 3 (ketiga) dengan Tujuan dan Sasaran pada masing masing Misi yakni :

- 1. Misi ke-2 (dua) yakni** : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

Tujuan ke -2.2 yakni : Peningkatan Inovasi dimasyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Indikator Sasaran : Nilai IKM

- 2. Misi ke-3 (tiga) yakni** : membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tujuan ke-1 (satu) yakni : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

Indikator Sasaran : Indeks reformasi birokrasi

Tabel 2. 1

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023

Visi	Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)		
Misi ke 2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian	Pengembangan standart Pelayanan untuk penyebaran Informasi	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat
Misi ke 3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat 2. Berusaha Meningkatkan anggaran untuk kegiatan

			pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal 3. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM
--	--	--	---

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menetapkan Sasaran Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yakni:

➤ Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
2. Tersedia nya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

➤ Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal
4. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di Lingkungan BKPSDM

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sebagai Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian secara tepat waktu

2. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 memuat 5 (lima) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang – bidang lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada Renstra BKPSDM. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yakni peningkatan SDM / Aparatur dan pelayanan yang sebaik – baiknya, sehingga tercapai Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Tabel 3. 1

Program Dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program		Kegiatan	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	I	Pendidikan Kedinasan	1.	Pendidikan Penjenjangan Struktural
				2.	Peningkatan keterampilan dan Profesionalisme
		II	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.	Seleksi Penerimaan CPNS
				4.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, ijin Belajar dan Ikatan Dinas
				5.	Penyusunan Formasi PNS
				6..	Penyelenggaraan Tes Kemampuan Pengembangan Karier PNS, Penyertaan ujian dinas dan Penyesuaian Ijasah
2.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi	II	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	7.	Penyusunan rencana Pembinaan Karier PNS
				8.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
				9.	Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	III	Peningkatan Kapasitas dan sumber daya Aparatur	10.	Workshop/kursus singkat untuk PNS
		IV	Pelayanan Administrasi perkantoran	11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik
				12.	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional
				13.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				14.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				15.	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

			16.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			17.	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan
			18.	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
			19.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
			21.	Penyediaan Makanan dan Minuman
			22.	Rapat-rapat Konsultasi dan koordinasi keluar daerah
			23.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD
			24.	Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian
			25.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
V	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	

Tabel 3. 3
Rekapitulasi Per Jenis Kelamin
PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

No	Unit Organisasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	17	38
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	12	31
3.	Badan narkotika Nasional	1		1
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	1	14
5.	Badan Pendapatan Daerah	20	8	28
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29	22	51
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	15	35
8.	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	11	8	19
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	11	24
10.	Dinas Kesehatan	196	459	655
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21	12	33
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	5	24
13.	Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan	24	5	29
14.	Dinas Pariwisata	17	8	25

15.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	50	23	73
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	8	33
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	12	11	23
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1105	1738	2843
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	20	25
20.	Dinas Perhubungan	32	10	42
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16	5	21
22.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	47	19	66
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28	18	46
24.	Dinas Sosial	19	8	27
25.	Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	92	54	146
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	30	14	44
27.	Inspektorat Kabupaten	23	18	41
28.	Kecamatan Bajuin	13	1	14
29.	Kecamatan Bati-bati	16	8	24
30.	Kecamatan Batu Ampar	14	2	16

31.	Kecamatan Bumi Makmur	14	2	16
32.	Kecamatan Jorong	13	4	17
33.	Kecamatan Kintap	8	3	11
34.	Kecamatan Kurau	16	5	21
35.	Kecamatan Panyipatan	11	3	13
36.	Kecamatan Pelaihari	27	31	58
37.	Kecamatan Takisung	18	2	20
38.	Kecamatan Tambang Ulang	17	4	21
39.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	37	5	42
40.	Sekretariat Daerah	74	35	109
41.	Sekretariat DPRD	23	11	34
42.	Sekretariat KPU	3	3	6
43.	Sekretariat Panwaslu		1	1
44.	UPT RSUD H. Boejasin Pelaihari	78	161	239
Jumlah		2290	2809	5099

Tabel 3. 4
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Per Golongan
Tahun 2019

UNIT ORGANISASI	GOLONGAN															Grand Total
	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					2	3	10	7	3	6	5	1		1		38
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1	1		3	3	2	2		9	7	1	2		31
Badan narkotika Nasional											1					1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1	2	1	4		2	1	2		1			14
Badan Pendapatan Daerah		1				2	4	5	1	4	6	3	1	1		28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					1	3	11	12	8	5	7	2	1	1		51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						2	3	5	7	7	6	3	2			35
Dinas Kepemudaan dan Olah raga							2	4	3	3	4	1	1	1		19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						2	5	3	2	2	7	1	1	1		24
Dinas Kesehatan					11	67	58	98	158	103	129	28	3			654

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan					1	1	2	4	5	6	7	3	3	1		33
Dinas Komunikasi dan Informatika						2	6	4	1	2	2	3	3	1		24
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan	1	5		3		1		2	3	3	6	3	1		1	29
Dinas Pariwisata				1	2	1	3	2	3	4	7	2				25
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			1	2	3	9	15	11	14	8	7	1	1	1		73
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					2	5	6	3	1	2	8	4	2			33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu						1	3	1	2	4	8	2	2			23
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	5	8	36	74	59	58	361	718	302	266	792	162			2843
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1		3	3		1	7	8	1	1		25
Dinas Perhubungan				1	1	4	4	13	7	3	6	2	1			42
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						1	2		2	2	7	3	3	1		21
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1	4	6	3	6	6	2	5	6	13	7	7				66

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			2		1	1	6	7	6	3	15	3	1	1		46
Dinas Sosial			2		1	2	4	1	2	4	4	4	2	1		27
Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan			1	3		5	3	25	15	21	36	22	14	1		146
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1	1				5	5	8	7	10	4	3			44
Inspektorat Kabupaten					1		4	10		6	8	4	6	2		41
Kecamatan Bajuin	1					2		1		2	7	1				14
Kecamatan Bati-bati			2	1		3	3	1	5		6	2	1			24
Kecamatan Batu Ampar				1	2		2	1	1	3	5	1				16
Kecamatan Bumi Makmur					4	1	2	1	1	1	4		2			16
Kecamatan Jorong			1		1	2	1	2	2		7	1				17
Kecamatan Kintap						1			2	2	4	2				11
Kecamatan Kurau					3		5	1	1	2	6	2	1			21
Kecamatan Panyipatan					2		2	1				5	3			13
Kecamatan Pelaihari		1			1	3	6	5	14	7	19	2				58
Kecamatan Takisung				2	1	3	1	1	3	4	5					20
Kecamatan Tambang Ulang			1	1			4	2	1	3	8	1				21

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		2	1			15	5	1	2	5	5	3	2	1		42
Sekretariat Daerah	1	1	1	2	2	11	18	20	11	12	19		5	6		109
Sekretariat DPRD		2			2	2	6	5	5	3	3	3	3			34
Sekretariat KPU		1			1	1	1				2					6
Sekretariat Panwaslu							1									1
UPT RSUD H. Boejasin Pelaihari		2			4	14	11	31	56	45	56	13	4	3		239
Jumlah	6	25	28	58	132	239	294	666	1082	611	748	947	235	27	1	5099

Tabel 3. 5
Rekapitulasi PNS Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2019

UNIT ORGANISASI	PENDIDIKAN												
	D/I	D/II	D/III	D/IV	Dokter	Pasca Sarjana	Sarjana	SD	SLTA Kejuruan	SLTA Umum	SLTP Kejuruan	SLTP Umum	Grand Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	12	1		3	15		3	2			38
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			4			5	12		6	1		3	31
Badan narkotika Nasional							1						1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			2				4		2	6			14
Badan Pendapatan Daerah			5			3	15		2	2		1	28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			17	3		2	19	1	1	8			51
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			3	2		7	18	1	4	1			35
Dinas Kepemudaan dan Olah raga			2	1		3	11		2				19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7				10		1	6			24
Dinas Kesehatan	18	1	374	26	1	19	142	3	51	17		2	654

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			1	1		1	23		3	4			33
Dinas Komunikasi dan Informatika			5	1		4	10			4			24
Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Perdagangan			1			6	10	6	1	2		3	29
Dinas Pariwisata			4	1		2	11	1	2	3		1	25
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		2	18	2		2	23	2	10	12		2	73
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3	2		2	14		5	6		1	33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu			3	2		2	13		1	2			23
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	457	21	3		62	1945	11	162	130	2	42	2843
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		3	1		5	13			2			25
Dinas Perhubungan		3	10	2		1	14		4	8			42
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3			4	11		1	2			21
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		1	4	1		8	22	5	5	9		11	66
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		2	7	4		3	20		6	2		2	46

Dinas Sosial				1		5	10	2	2	6		1	27
Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan			11	22		4	85	2	9	11		2	146
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1		5	1		4	24	1	3	5			44
Inspektorat Kabupaten			4	4		7	24			1		1	41
Kecamatan Bajuin			2			1	8	1	1	1			14
Kecamatan Bati-bati			3			1	9	3	4	4			24
Kecamatan Batu Ampar			2			1	9		1	3			16
Kecamatan Bumi Makmur			2	1		2	5		2	3		1	16
Kecamatan Jorong			3	2			6		3	2		1	17
Kecamatan Kintap				1			8		1	1			11
Kecamatan Kurau	1		2			1	9		1	4	1	2	21
Kecamatan Panyipatan			2			2	6		1	1		1	13
Kecamatan Pelaihari			8	3		1	26	1	6	12		1	58
Kecamatan Takisung				2		2	5		5	5		1	20
Kecamatan Tambang Ulang			3	2			8	1	2	3		2	21
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			1	1		4	12	2	9	13			42

Sekretariat Daerah		1	10	9		11	44	3	13	17		1	109
Sekretariat DPRD			2			4	12	1	4	9		2	34
Sekretariat KPU							2	1	1	2			6
Sekretariat Panwaslu			1										1
UPT RSUD H. Boejasin Pelayhari	3		121	13		16	54	2	18	9		3	239
Jumlah	31	465	691	115	1	210	2743	56	356	341	3	87	5099

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan Pokok untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan 5 (lima) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan dengan nilai keseluruhan pagu sebesar **Rp. 20.693.677.650,-** dengan serapan dana APBD sebesar **Rp. 13.464.812.234,-** atau **65,07%** dengan kondisi anggaran **SILPA** sebesar **Rp. 7.616.302.961,-**

Tabel 3. 6

Pagu dan Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
a. Belanja tidak Langsung	11.113.959.738	6.808.005.708	4.305.954.030	61,26
– Gaji dan Tunjangan	8.134.101.326	4.642.423.189	3.491.678.137	
– TPP	2.979.858.412	2.165.582.519	814.275.893	
b. Belanja Langsung	9.579.717.912	6.656.806.526	2.922.911.386	68,54
– Belanja Pegawai	558.875.000	331.975.000	226.900.000	
– Belanja Barang dan Jasa	8.843.897.912	6.161.262.326	2.682.635.586	
– Belanja Modal	176.945.000	163.569.200	13.375.800	
BTL + BL	20.693.677.650	13.464.812.234	7.228.865.416	65,07

Tabel 3. 7
Ringkasan dan Realisasi APBD SKPD berdasarkan program
Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.964.037.452	1.816.592.234	92,49
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	129.600.000	125.444.855	96,79
2	Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	98.730.000	41.199.233	41,73
3	Kegiatan jasa administrasi keuangan	39804.800	35.734.100	89,77
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	11.009.500	7.011.500	63,69
5	Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	36.774.000	23.464.033	63,81
6	Kegiatan penyediaan ATK	28.713700	19.093.600	66,50
7	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.010.000	13.475.000	79,22
8	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9.072.000	6.594.600	72,69
9	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	176.945.000	163.569.200	92,44
10	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	3.888.000	3.300.000	84,88
11	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	25.991.000	22.103.000	85,04
12	Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.013.860.842	1.000.360.332	98,67
13	Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang milik daerah pada SKPD	16.372.750	7.761.100	47,40
14	Kegiatan penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	15.368.900	9.398.400	61,15
15	Kegiatan jasa penunjang kinerja SKPD	340.896.960	338.083.290	99,17

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.600.000	13.699.400	63,42
16	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	21.600.000	13.699.400	63,42
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.007.000	779.400	77,40
17	Workshop / kursus singkat untuk PNS	1.007.000	779.400	77,40
IV	Program Pendidikan Kedinasan	3.996.718.400	2.464.540.408	61,66
18	Kegiatan pendidikan penjenjangan struktural	3.816.718.400	2.364.095.408	61,94
19	Kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalisme	180.000.000	100.445.000	55,80
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.596.355.060	2.361.195.075	65,66
20	Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier PNS	699.446.000	398.169.600	56,93
21	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS	430.305.200	127.306.900	29,59
22	Kegiatan pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	395.625.000	313.123.450	79,15
23	Kegiatan proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS	42.063.710	27.708.750	65,87
24	Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas	1.631.891.100	1.147.981.700	65,87
25	Kegiatan penyusunan formasi pegawai	17.048.100	5.540.400	32,50
26	Kegiatan penyelenggaraan tes kemampuan, pengembangan karier pegawai, penyertaan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijasah	379.947.950	341.364.275	89,84
JUMLAH		9.579.717.912	6.656.806.526	69,49

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Sasaran Strategis		Rencana Kerja			Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian Program	Sasaran Program	Kegiatan	Uraian Program	Sasaran Program	Kegiatan
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Pendidikan Kedinasan Aparatur	1. Kegiatan Pendidikan Penjurangan Struktural	1. Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Pendidikan Kedinasan Aparatur	1. Kegiatan Pendidikan Penjurangan Struktural
				2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme			2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Meningkatnya pemenuhan hak - hak kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak - hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Kegiatan Workshop / Kursus Singkat untuk PNS	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Kegiatan Workshop / Kursus Singkat untuk PNS
				2. Kegiatan Pendidikan Prajabatan	-	-	-

Tersedianya akurasi data kepegawaian, aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi dan meningkatnya disiplin pegawai	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbina dan Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbina dan Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
	2. Persentase pegawai yang datanya akurat			2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS			2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
	3. Persentase penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN dan Persentase penyelesaian hasil rekomendasi inspektorat			3. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah			3. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

				4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS			4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran
				5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
				6. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS			6. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS
				7. Penyelenggaraan Tes Kemampuan Pengembangan Karier PNS, Penyertaan Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah			7. Penyelenggaraan Tes Kemampuan Pengembangan Karier PNS, Penyertaan Ujian Dinas, dan

							Ujian Penyesuaian Ijasah
Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, serta peningkatan nilai SAKIP	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
				2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
				3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

							Keuangan
				4. Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			4. Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
				7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan			8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

				Bangunan Kantor			Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
				10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag - Undangan			10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag - Undangan
				11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
				12. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan			12. Kegiatan Rapat - Rapat

				Konsultasi Keluar daerah			Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
				13. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah pada SKPD			13. Kegiatan Peningkata n Manajeme n Aset / Barang Daerah pada SKPD
				14. Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian			14. Penyusuna n Administra si Pengelolaa n Kepegawai an
				15. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD			15. Penyediaa n jasa penunjang kinerja SKPD

		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
--	--	--	---	--	--	---	--

6. Kondisi Sarana dan Prasarana BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut terletak di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari adapun Sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk nya adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
ASET TETAP	
- Tanah	2.567.000.000,00
- Peralatan dan Mesin	3.881.884.829.42
- Jalan,irigasi dan Jaringan	8.461.059.908.00
- Aset Tetap Lainnya	300.723.000.00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(5.857.549.822.42)
JUMLAH ASET TETAP	9.353.117.915.00
ASET LAINNYA	8.231.424.00
NILAI ASET BKPSDM	9.361.349.339.00

Keseluruhan asset tetap diatas dikelola oleh badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019 dengan Kondisi Baik

7. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai fungsi pelayanan, juga mengalami permasalahan dan faktor yang mempengaruhi, yakni :

- a. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pegawai, dimana permasalahannya dan faktor yang mempengaruhi adalah masih belum optimalnya pengembangan kemampuan / kapasitas aparatur sesuai formasi kemampuan yang dibutuhkan, serta belum tersusunnya pola karier sebagaimana mestinya.
- b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi, pembinaan disiplin dan pemberhentian pegawai, dimana permasalahannya dan faktor yang mempengaruhi adalah SKPD belum maksimal melaporkan secara tertulis keadaan yang sebenarnya mengenai kedisiplinan PNS di SKPD mereka, sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan kepegawaian, serta belum optimalnya transfer informasi perkembangan regulasi dan administrasi kepegawaian ke PNS yang bertugas di wilayah kecamatan.
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mempunyai isu permasalahan belum optimalnya pemanfaatan alumni diklat dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah dan belum terencananya secara komprehensif akan diklat dan bimbingan teknis PNS. Hal ini dipengaruhi oleh belum terevaluasinya akan pemanfaatan alumni diklat / bimtek serta belum adanya dokumen rancangan kebutuhan diklat / bimtek dalam suatu masa tertentu.

➤ Solusi untuk Peningkatan Kinerja BKPSDM

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian yang mengacu pada hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- b. Adanya suatu Indikator Kunci yang mengukur Profesionalisme ASN yang diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu Indek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN), BKPSDM mulai melakukan finalisasi data pengukuran indeks profesionalitas ASN Tahun 2019 sebanyak 4850 orang update data SAPK, IP ASN ini memuat 4 (empat) Variabel yaitu, Nilai Kompetensi, Nilai Kinerja, Kompensasi dan tingkat Kedisiplinan yang mana tujuan yang diperoleh dari IP ASN ini yaitu
 1. Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.
 2. Mengetahui proxy tingkat pencapaian profesionalitas di sebuah organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN.
 3. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesional ASN dalam sebuah organisasi dimasa yang akan datang.
- c. Peningkatan kualitas Kedisiplinan yang didukung *reward* dan *punishment* akan semakin dipeketat.
- d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan arsip secara elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi.
- e. Dalam pelayanan peningkatan Kompetensi teknis dan Manejerial kedepannya BKPSDM akan memperhatikan Diklat yang sifatnya Tekhnis substantif dengan Kurikulum yang baru dan metode kerja terbaru.
- f. Peningkatan pola pikir positif dan Motivasi berkinerja akan terus dilakukan secara berkesinambungan, metode monitoring, konseling, dan pendampingan penilaian kinerja menjadi suatu keharusan guna mewujudkan aparatur yang Profesional dan berintegritas tinggi

B. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 3. 8

Indikator Kinerja Kunci BKPSDM

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
		1 1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 1.035 orang $\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	60.81%	
		1.2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 483 orang $\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional bersertifikat}}{\text{Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	72.52%	

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

Tabel 4. 1

Tabel Target dan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2019

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2019 (Rp.)	REALISASI			
					FISIK/KINERJA	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9=(8/5)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	129.600.000	12 Bulan	100%	125.444.855	97%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	98.730.000	12 Bulan	100%	41.199.233	42%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	39.804.800	12 Bulan	100%	35.734.100	90%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan dan Keindahan Kantor	12 Bulan	11.009.500	12 Bulan	100%	7.011.500	64%

5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kerja	12	Bulan	36.774.000	12	Bulan	100%	23.464.033	64%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	28.713.700	12	Bulan	100%	19.093.600	66%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	12	Bulan	17.010.000	12	Bulan	100%	13.475.000	79%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	12	Bulan	9.072.000	12	Bulan	100%	6.594.600	73%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	176.945.000	12	Bulan	100%	163.569.200	92%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12	Bulan	3.888.000	12	Bulan	100%	3.300.000	85%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12	Bulan	25.991.000	12	Bulan	100%	22.103.000	85%
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	Bulan	1.013.860.842	12	Bulan	100%	1.000.360.332	99%
13	Peningkatan Manajemen Aset/Barang daerah pada SKPD	Terlaksananya Pendataan, Pengelolaan dan Pelaporan, Serta penghapusan Aset/ barang milik daerah pada Kantor BKPSDM	12	Bulan	16.372.750	12	Bulan	100%	7.761.100	47%
14	Penyusunan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Pintu	12	Bulan	15.368.900	12	Bulan	100%	9.398.400	61%

15	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Honor (PTT) BKPSDM	12	Bulan	340.896.960	12	Bulan	100%	338.083.290	99%
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							100%		
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor/rumah Dinas/asrama Diklat Loka Bina Praja	12	Bulan	21.600.000	12	Bulan	100%	13.699.400	63%
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							100%		
17	Workshop/Kursus singkat untuk PNS	Jumlah Dokumen Daftar PNS menjelang pensiun yang akan mengikuti pembekalan	1	Dokumen	1.007.000	1	Dokumen	100%	779.400	77%
IV	PENDIDIKAN KEDINASAN							67.37%		
18	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Terlaksananya penyelenggaraan Diklat PIM II, III dan IV	57	Orang	3.816.718.400	40	Orang	70%	2.364.095.408	62%
		Jumlah Penyertaan Pelatihan Dasar	206	Orang		200	Orang	97%		
19	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah Peserta Diklat Penyertaan	45	Orang	180.000.000	23	Orang	51%	100.445.000	56%

V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR					70.43%		
20	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	650 Orang	699.446.000	741 Orang	114%	398.169.600	57%
		Jumlah Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat PNS	800 Orang		1004 Orang	126%		
		Jumlah Mutasi PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	500 Orang		398 Orang	80%		
21	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019	265 Orang	430.306.200	241 Orang	91%	127.306.900	30%
22	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	395.625.000	4 Dokumen	100%	313.123.450	79%
23	Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Tertanganinya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberhentian PNS /Pensiun dan Pelayanan Konseling	20 Kasus	42.063.710	14 Kasus	70%	27.708.750	66%
			100 Orang/ Pensiun		160 Orang/ Pensiun	160%		
			6 Kali Layanan Konseling		1 Kali Layanan Konseling	17%		

24	Pemberian Bantuan tugas belajar, izin belajar, izin belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar bagi PNS Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	39 Orang	1.631.891.100	11 Orang	28%	1.147.981.700	70%
25	Penyusunan Formasi PNS	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1 Dokumen	17.048.100	0 Dokumen	0%	5.540.400	32%
26	Penyelenggaraan tes kemampuan, Pengembangan Karier Pegawai, Penyertaan Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah Peserta Penyelenggaraan tes kemampuan, Pengembangan Karier Pegawai, Penyertaan Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Aseessment	95 Orang	379.974.950	81 Orang	85%	341.364.275	90%
	JUMLAH			9.579.717.912		87.56%	6.656.806.526	69%

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

Tidak ada

B. Tugas Pembantuan yang di Berikan

Tidak ada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Tanah Laut Tidak Melaksanakan Tugas Pembantuan

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama dengan Mitra Kerja

- **Mitra yang diajak Kerjasama :**
 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BKPSDMD) provinsi
 3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 4. Politekhnik Kabupaten Tanah Laut

- **Bidang Kerjasama**
 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar CPNS dan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV (PIM IV)
 2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
 3. Pelaksanaan uji Kompetensi maupun test Psikologis bagi pejabat Struktural Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
 4. Pelaksanaan Penerimaan CPNS

- **Nama Kegiatan**
 1. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
 2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
 3. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
 4. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
 5. Kegiatan Penyelenggaraan tes wawancara Pengembangan Karier Pegawai, penyertaan ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
 6. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Pola Kerjasama Tahun 2019****I. Pelaksanaan Pendidikan Kompetensi**

Uraian	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Yang Lulus
Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	169	169
• Latsar CASN Gol. II	40	40
• Latsar CASN Gol III	120	120
• Penyertaan Latsar CASN Gol. III	9	9
Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	52	52
• Diklat PIM II	3	3
• Diklat PIM III	9	9
• Diklat PIM IV	40	40

II. PELAKSANAAN UJIAN DINAS

No.	Ujian Dinas	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
1	Ujian Dinas Tingkat I	6 orang	30 Januari 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
2	Ujian Dinas Tingkat II	2 orang	31 Januari 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
Total peserta		8 orang			

III. PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)

No.	Pendidikan yang disesuaikan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
1	S1	14 orang	26 Juni 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
2	SLTA	1 orang	26 Juni 2019	BKD Prov. Kalsel	Lulus semua
Total peserta		15 orang			

IV. Pelaksanaan Tugas Belajar

No.	Tugas Belajar	Jumlah PNS Tugas Belajar	Ket
1	Dokter Spesialis	2 orang	Biaya Pemkab Tanah Laut
2	S2	1 orang	Biaya RSIA Ibunda
3	S1 dan Profesi	1 orang	Biaya Kemenkes RI
Jumlah		4 orang	

V. Pelaksanaan izin belajar

No.	Izin Belajar	Jumlah PNS Izin Belajar	Ket
1	S2	10 orang	
2	S1	21 orang	
3	D4	1 orang	
4	D3	36 orang	
Jumlah		68 orang	

VI. Pelaksanaan Pencantuman Gelar

No.	Pencantuman Gelar	Jumlah PNS Pencantuman Gelar	Ket
1	S2	12 orang	
2	S1 dan Profesi	1 orang	
3	S1	24 orang	
4	Profesi	1 orang	
5	D3	24 orang	
6	Paket C	5 orang	
7	Paket B	2 orang	
Jumlah		69 orang	

VII. Pelaksanaan Asesment

No.	Asesmen	Jumlah Peserta			Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Ket.
		JPT	Administrator	Pengawas			
1	Talent Pool	5 orang	14 orang		25 s.d 27 Juni 2019	BKN Kanreg VIII Banjarmasin	BKN
2	Asesmen bagi pelamar seleksi pengisian 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		38 orang		12 s.d 14 Agustus 2019	Hotel Novotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
3	Asesmen bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	4 orang			19 Desember 2019	Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
4	Asesmen bagi calon Pejabat Administrator			16 orang	20 Desember 2019	Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru	Kerja sama dengan Unit Koordinasi Pelayanan Psikologi Unlam
Total peserta		9 orang	52 orang	16 orang			

➤ Sumber dan Jumlah Anggaran dan Realisasi

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Pendidikan Kedinasan		3.996.718.400	2.464.540.408	61.66%
		2. Pendidikan penjenjangan struktural	3.816.718.400	2.364.095.408	61.94%
		3. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	180.000.000	100.445.000	55.80%
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2.459.220.350	1.622.193.275	65.96%
		1. Seleksi penerimaan CPNS	430.306.200	127.306.900	29.59%
		2. Pemberian bantuan tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas	1.631.891.100	1.147.981.700	70.35%
		3. Penyusunan formasi PNS	17.048.100	5.540.400	32.50%
		4. Penyelenggaraan tes kemampuan pengembangan karier PNS, penyertaan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijasah	379.974.950	341.364.275	89.84%
	J U M L A H		6.455.938.750	4.086.733.683	63.30%

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

a. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi
3. Meningkatnya pemenuhan hak - hak kepegawaian ASN
4. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
6. Tersedianya akurasi data kepegawaian

b. jenis produk pelayanan antara lain :

1. Menyusun formasi tentang kebutuhan PNS di Kabupaten Tanah Laut
2. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kepangkatan dan Penggajian, SK Mutasi, dan SK Pensiun
3. Data SIMPEG
4. Membuat Kartu Pegawai, TASPEN, dan TAPERUM
5. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prajabatan
6. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Struktural
7. Pelaksanaan / penyertaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknis / Fungsional
8. Pelaksanaan PNS Tugas Belajar, SK Ijin Belajar, dan Ikatan Dinas
9. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD

[illegible]

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut

Tabel 8. 1

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan
1	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	1 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial dan Kompetensi Tekhnis	100%	Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa Diklatsar, Diklat PIM dan Teknis dan Diklat Fungsional
2	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi	1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100%	Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah dengan Melaksanakan Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan ASN dan memfasilitasi Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat ASN
3	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1 Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Baik	Kegiatan yang mendukung Indikator ini dengan survey IKM dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan kepegawaian

B. Capaian Target Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 8. 2
Capaian Target dan Kinerja Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
I.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara				
1.	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :	%	100	79,22	79,22
	- Kompetensi manajerial	%	100	84,03	
	- Kompetensi Tekhnis	%	100	51,11	
II.	Sasaran Strategis 2 : Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi				
2.	Persentase jabatan yang di isi sesuai dengan Kompetensi	%	100	94,99	94,99
III.	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian				
3	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi	Indeks	Baik	Baik	100
	- Nilai rata- rata unsur			28.935	
	- Nilai rata-rata tertimbang			3.183	
	- Nilai IKM			79.57	
Nilai rata rata capaian					91,40

C. Perbandingan Capaian Kinerja 2019 terhadap capaian 2018

Tabel 8. 3
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :	100%	97.92%	97.92%	100%	79.22%	79.22
1. Kompetensi manajerial	100%	100%		100%	84.03%	
2. Kompetensi teknis	100%	80%		100%	51.11%	
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	703	666	95.28%	699	664	94.99%
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian				Baik	Baik	100%

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023

Tabel 8. 4

Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD 2018 - 2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target		Realisasi		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi : - Kompetensi manajerial - Kompetensi teknis	94,74 56,49	94,74 56,49	96,16 60,67	100% 80%	84.03% 51.11%	100 73,22
2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100	100	100	95.28%	94.99%	100
3	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	BAIK		BAIK		BAIK	BAIK

E. Analisis efisiensi dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu, semakin tinggi sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu maka efisiensinya akan semakin rendah, sebaliknya pun begitu semakin rendah semua sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaran semakin tinggi.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 Menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi, upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan Penggunaan Pengembangan sistem Kepegawaian melalui aplikasi yang dapat meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian :

- Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian);
- E-SKP;
- Sidika (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian);
- Silka (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian);
- Sinovda (Sistem Informasi Inovasi Daerah);
- dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target dan Kinerja

Tabel 8. 5

*Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target dan Kinerja
Tahun 2019*

No	Sasaran Strategis	Program		Kegiatan
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	I	Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
				2. Peningkatan keterampilan dan Profesionalisme
		II	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3. Seleksi Penerimaan CPNS
				4. Pemberian Bantuan Tugas Belajar, ijin Belajar dan Ikatan Dinas
				5. Penyusunan Formasi PNS
				6.. Penyelenggaraan Tes Kemampuan Pengembangan

				Karier PNS, Penyertaan ujian dinas dan Penyesuaian Ijasah
2.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart Kompetensi			7. Penyusunan rencana Pembinaan Karier PNS
				8. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
				9. Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin
				10. Workshop/kursus singkat untuk PNS
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	III	Peningkatan Kapasitas dan sumber daya Aparatur	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik
		IV	Pelayanan Administrasi perkantoran	12. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional
				13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				14. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				15. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
				16. Penyediaan Alat Tulis Kantor
				17. Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan
				18. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
				19. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				20. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan
				21. Penyediaan Makanan dan Minuman
				22. Rapat-rapat Konsultasi dan koordinasi keluar daerah

				23. Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD
				24. Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian
				25. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		V	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang telah dijabarkan diatas didalamnya mengandung muatan Gambaran Umum SKPD, Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkruen, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2019 mengelola kegiatan belanja Langsung sebanyak dengan 5 (lima) Program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan dengan nilai keseluruhan pagu sebesar **Rp. 20.693.677.650,-** dengan serapan dana APBD sebesar **Rp. 13.464.812.234,-** atau **65,07%** dan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata- rata realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar **87,56 %** atau nilai realisasi Kinerja tahun ini berada pada kriteria **“Tinggi”** lebih tingginya capaian kinerja dari pada persentase penyerapan dana merupakan penghematan anggaran dimana target dari kegiatan di semua indikator telah tercapai atau memenuhi target.

Strategi yang perlu di perlukan guna meningkatkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dimasa mendatang antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian yang mengacu pada hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Adanya suatu Indikator Kunci yang mengukur Profesionalisme ASN yang diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN), BKPSDM mulai melakukan finalisasi data pengukuran indeks profesionalitas ASN Tahun 2019 sebanyak 4850 orang update data SAPK, IP ASN ini memuat 4 (empat) Variabel yaitu, Nilai Kompetensi, Nilai Kinerja, Kompensasi dan tingkat Kedisiplinan yang mana tujuan yang diperoleh dari IP ASN ini yaitu :

- a. Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.
 - b. Mengetahui proxy tingkat pencapaian profesionalitas di sebuah organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN.
 - c. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesional ASN dalam sebuah organisasi dimasa yang akan datang.
3. Peningkatan kualitas Kedisiplinan yang didukung *reward* dan *punishment* akan semakin dipeketat.
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan arsip secara elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi.
5. Dalam pelayanan peningkatan Kompetensi teknis dan Manejerial kedepannya BKPSDM akan memperhatikan Diklat yang sifatnya Tekhnis substantif dengan Kurikulum yang baru dan metode kerja terbaru.
6. Peningkatan pola pikir positif dan Motivasi berkinerja akan terus dilakukan secara berkesinambungan, metode monitoring, konseling, dan pendampingan penilaian kinerja menjadi suatu keharusan guna mewujudkan aparatur yang Profesional dan berintegritas tinggi

B. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

1. Nama Prestasi	:	Instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
Nama yang berprestasi	:	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Instansi Penyelenggara	:	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
2. Nama Prestasi	:	Pengelola Kepegawaian Terbaik Kategori Manajemen Kepegawaian Berbasis IT
Nama yang berprestasi	:	BKPSDM Kabupaten Tanah Laut
Instansi Penyelenggara	:	Badan Kepegawaian Negara Regional VIII

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 ini kami buat untuk bahan selanjutnya

Pelaihari, Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700217 199009 1 001